

**KOMUNIKASI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA
DESA DI DESA TANA TORO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Surianah¹, Muhammad Rais Rahmat Razak², Herman Dema³

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email Korespondensi: anahsurianah7@gmail.com

Email: mraisahmat@gmail.com; hermandema1010@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to find out how the village government communicates in managing village fund allocation in Tana Tor Village in Sidenreng Rappang Regency. This research uses a qualitative description method. Data sources were obtained from observations, interviews and documentation. The data analysis techniques for this research are data reduction, data presentation and drawing conclusions. So the data that has been analyzed is then processed using Nvivo 12 plus. The research results show that village government communication in managing village fund allocation is still less effective. The factors inhibiting village government communication in managing village fund allocations are interference, interests and prejudice, in this case interference which has a high percentage of the other two factors.

Keywords: Allocation of Village Funds, Communications and Government

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana komunikasi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tana Toro di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Sumber data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. teknik analisis data penelitian ini ialah reduksi data, penyajian data dan Penarikan Kesimpulan. Analisis data disajikan dan diolah menggunakan Nvivo 12 plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa masih kurang efektif. Adapun faktor penghambat komunikasi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah didominasi oleh gangguan, kepentingan, kemudian disusul dengan prasangka.

Kata kunci : Alokasi Dana Desa, Komunikasi, dan Pemerintah

PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good governance) menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat didalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik, diperluan adanya prinsip-prinsip good qovernance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum (Razak et al., 2022). Pelaksanaan ADD diterapkan agar memperkuat tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun suatu desa. mengingat masyarakat desa yang lebih memahami kebutuhan dan potensi desa. Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan ADD ialah keterlibatan masyarakat desa dalam proses pengelolaan Dana Desa (Hutami, 2017). Tata kelola Pemerintah Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, termasuk termasuk aturan penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) dan kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 5 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa, sebagai pendapatan Desa yang berasal dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengelolaan alokasi dana desa wajib dilakukan secara transparan lewat musyawarah desa dimana anggarannya juga

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



diperuntukkan untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Desa sebagai pemerintahan terbawah dalam hierarki pemerintahan pusat, dituntut untuk menyampaikan penggunaan Alokasi dana desa yang diperolehnya secara terbuka kepada masyarakat. Menyampaikan informasi kinerja desa dalam mengelola alokasi dana desa kepada masyarakat, merupakan bentuk komunikasi pemerintah desa. Tujuan komunikasi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah untuk memberi tahu masyarakat apa yang dialokasikan dana desa dan berapa nominalnya. Selain itu, di balik proses penyebaran informasi tentang alokasi dana desa adalah sifat alokasi dana desa yang membuat masyarakat harus mengetahuinya secara transparan. Tujuannya adalah agar warga dapat membantu memantau bagaimana dana yang dialokasikan oleh pemerintah desa digunakan (Fathoni, 2021).

Komunikasi yang dikatakan baik dilihat dari pemerintah desa dengan masyarakat yang dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk melaksanakan kerja sama, sehingga meningkatkan transparansi, serta memupuk rasa tanggung jawab bersama dalam setiap langkah pembangunan desa. komunikasi yang efektif akan membantu menghindari misinformasi dan kesalahpahaman yang dapat menghambat proses pembangunan. Pemerintah desa harus mengutamakan prinsip-prinsip komunikasi yang baik, yaitu kejujuran, keterbukaan, dan kesederhanaan dalam menyampaikan informasi (Dewi, 2021).

Desa Tana Toro termasuk salah satu desa yang menerima dana ADD yang cukup besar yaitu mencapai 1miliar di Tahun 2023, Sehingga adanya alokasi dana desa tersebut tentunya membuat masyarakat menginginkan peningkatan infrastruktur, kesejahteraan, dan aspek lainnya di desanya. Karena besarnya anggaran desa yang diberikan, masyarakat harus diinformasikan secara menyeluruh. Alokasi dana desa, yang merupakan bagian dari dana kompensasi kota atau kabupaten, dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus didasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan (Razak, 2022), profesional, efektif, dan efisien, bersih, dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 23 Oktober 2023 di Kantor Desa Tana Toro menunjukkan bahwa terdapat permasalahan alokasi dana desa yaitu terkait dengan pengelolaannya yang belum terbuka. Beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa pada proses perencanaan pemerintah desa belum sepenuhnya terbuka karena hanya sebagian kecil masyarakat saja yang dilibatkan dalam proses tersebut. Selain itu, menunjukkan komunikasi yang masih kurang antara organisasi pengelola alokasi dana desa dan masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa aparat Desa Tana Toro memiliki keterbatasan dalam memberikan informasi tentang penggunaan dana desa kepada masyarakat, sehingga masyarakat desa masih memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang keberadaan alokasi dana desa. Hal ini terjadi tidak hanya dialami oleh aparat desa tetapi juga oleh masyarakat desa.

Menurut (Abidin, 2016) dalam bukunya tentang komunikasi pemerintahan, Komunikasi pemerintahan adalah bagian dari komunikasi organisasi, dan merupakan komponen penting dari organisasi pemerintah. Melalui komunikasi pemerintahan, birokrat pemerintah dapat berbagi informasi, gagasan, perasaan, dan sikap dengan komunikan lainnya. Komunikan ini termasuk aparatur pemerintah di dalam dan di luar organisasi, serta masyarakat dan organisasi non-pemerintah di luar organisasi.

Menurut lasswell dalam (Abidin, 2016), terdapat 5 indikator komunikasi pemerintahan yaitu, siapa/sumber (who), berbicara apa (says what), saluran/komunikasi (in which channel), siapa/penerima (to whom), dan dampak/efeknya seperti apa (what that effect). Adapun Menurut (Wifalin, 2016) ada beberapa hal yang menjadi hambatan komunikasi yang menjadi perhatian ketika komunikator ingin komunikasinya berjalan sesuai tujuan yaitu, Gangguang, Kepentingan dan Prasangka.

Menurut (D. Alita, S. Priyanta, 2019) Pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan dikenal sebagai pengelolaan. Secara umum, pengelolaan adalah proses mengubah sesuatu menjadi lebih baik, kuat, dan bernilai dari semula. Pengelolaan alokasi dana desa tidak dapat dipisahkan dengan APBDes yang merupakan bagian

pengelolaan keuangan desa. Menurut (Safitri & Fathah, 2018) secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa diatur dengan pengelolaan dana desa melalui berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitian yang menggambarkan data yang berupa tulisan serta mengamati perilaku orang yang diamati. Menurut (Sugiyono, 2013) Penelitian kualitatif, yang berbasis pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawan dari eksperimen), di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Metode pengumpulan data dilakukan secara induktif atau kualitatif, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ini mencoba menggambarkan bagaimana komunikasi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tana Toro Kabupaten Sidenreng Rappang.

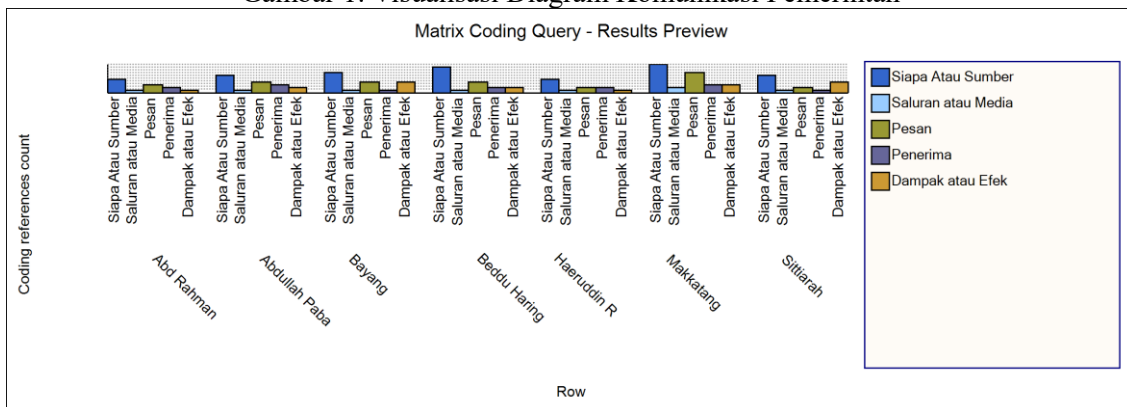
Pada penelitian ini memiliki tiga teknik pengumpulan data yaitu :

1. Observasi merupakan pengamatan terhadap objek yang telah menjadi tujuan untuk menunjang kelengkapan data yang dibutuhkan peneliti.
2. Wawancara yaitu sebuah teknik pengumpulan dan mendapatkan data melalui proses berbincang atau berdialog, diskusi dan tanya jawab dari informan yang dianggap mengetahui banyak informasi tentang objek dan masalah penelitian yang dilakukan.
3. Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dari sumber penelitian, yang dapat berupa dokumen elektronik (rekaman), gambar atau foto.

PEMBAHASAN

Komunikasi Pemerintah Desa

Gambar 1. Visualisasi Diagram Komunikasi Pemerintah



Sumber : Hasil analisis Nvivo 12 Plus, 2024

Hasil analisis terkait komunikasi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tana Toro pada Abd Rahman selaku Ketua BPD menunjukkan bahwa siapa/sumber menjadi hal yang dominan dari kelima indikator dengan angka persentase sebesar 41,67%, sedangkan pesan berada pada angka persentase kedua yakni sebesar 25,00%, dan sedangkan penerima berada pada angka persentase ketiga yakni sebesar 16,67%, kemudian menariknya lagi bahwa media/saluran dan dampak/efek menjadi dua indikator yang memiliki angka persentasi yang sama dan paling rendah yakni 8,33%.

Hasil analisis terkait komunikasi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tana Toro pada Abdullah Paba selaku Kepala Desa menunjukkan bahwa siapa/sumber menjadi hal yang dominan dari kelima indikator dengan angka persentasi sebesar 37,50%, sedangkan pesan berada pada angka persentase kedua yakni sebesar 25,00%, kemudian penerima berada pada angka

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



persentase ketiga yakni sebesar 18,75%, dan dampak/efe berada pada angka persentase keempat yakni sebesar 12,50%, dan sedangkan saluran/media berada pada angka persentase paling rendah yakni sebesar 6,25%.

Hasil analisis terakit komunikasi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tana Toro pada Bayang selaku masyarakat menunjukkan bahwa siapa/sumber menjadi hal yang dominan dari kelima indikator dengan angka persentase sebesar 41,18%, sedangkan angka persentase terendah pada dua indikator yakni saluran/media dan penerima dengan angka persentase sebesar 5,88%, kemudian menariknya lagi bahwa kedua indikator lainnya juga memiliki angka persentasi yang sama yakni sebesar 23,53%.

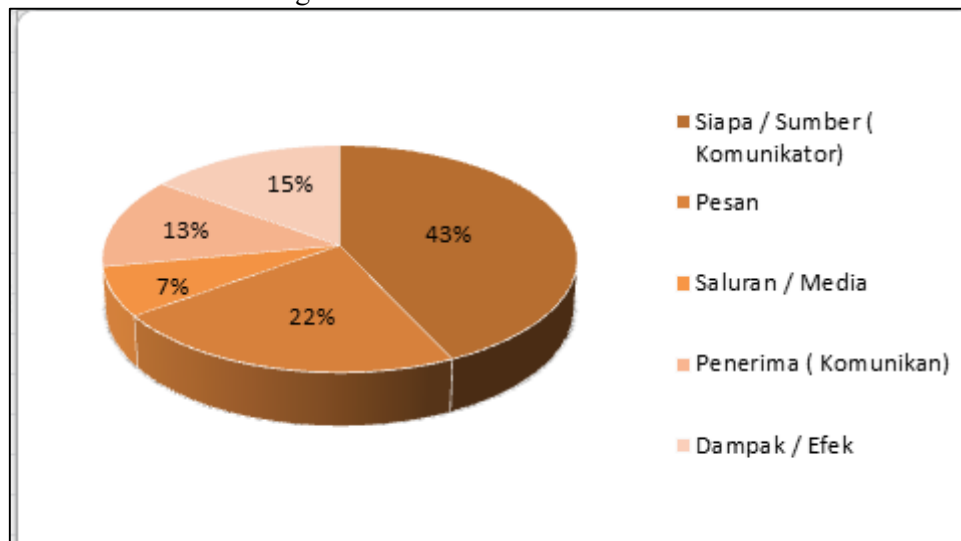
Hasil anilis terkait komunikasi pemeritah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tana Toro pada Beddu Haring selaku masyarakat menunjukkan bahwa siapa/sumber menjadi hal yang dominan dari kelima indikator dengan angka persentase sebesar 50,00%, sedangkan pesan berada pada angka persentase kedua yakni sebesar 22,22%, dan sedangkan saluran/media berada pada angka persentase paling rendah yakni sebesar 5,56%, kemudian menariknya lagi bahwa kedua indikator yakni penerima dan dampak/efek memiliki angka persentase yang sama yakni sebesar 11,11%.

Hasil analisis terkait komunikasi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tana Toro pada Heruddin R selaku masyarakat menunjukkan bahwa siapa/sumber menjadi hal yang dominan dari kelima indikator dengan angka persentase sebesar 45,45%, sedangkan angka persentase terenda pada dua indikator yakni saluran/media dan dampak/efek dengan angka persentase sebesar 9,09%, kemudian menariknya kedua indikator lainnya yani pesan dan penerima memiliki angka persentase yang sama sebesar 18,18%.

Hasil analisis terkait komunikasi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tana Toro pada Makkatang selaku sekretaris desa menunjukkan bahwa siapa/sumber menjadi hal yang dominan dari kelima indikator dengan angka persentase sebesar 40,00%, sedangkan pesan berada pada angka persentase kedua yakni sebesar 28,00%, dan sedangkan saluran/media berada pada angka persentase paling rendah yakni sebesar 8,00%, dan menariknya kedua indikator lainnya yakni penerima dan dampak/efek memiliki angka persentaase yang sama sebesar 12.00%.

Hasil analisi terkait komunikasi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tana Toro Pada Sittiarah selaku masyarakat menunjukkan bahwa siapa/sumber menjadi hal yang dominan dari kelima indikator dengan angka persentase sebesar 42,86%, sedangkan dampak/efek berada pada angka persentase kedua yakni sebesar 28.57%, dan sedangkan pesan berada pada angka persentasi ketiga yakni sebesar 14,29%, dan kemudian kedua indikator lainnya yakni saluran/media dan penerima berada pada angka persentase yang paling rendah sebesar 7,14%

Gambar 2. Diagram Validasi Indikator Komunikasi Pemerintah



Sumber: Mixrosoft Exel, 2024

Dari indikator komunikasi pemerintah terlihat jelas bahwa siapa atau sumber menjadi indikator yang paling dominan dari informan dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan persentase mencapai 43%, sedangkan pesan memiliki persentase keseluruhan mencapai 22%, kemudian dampak atau efek memiliki persentase 15 %, selanjutnya penerima memiliki persentase keseluruhan mencapai 13%, dan kemudian indikator yang memiliki persentase terendah yaitu saluran atau media dengan persentase 7%.

Berdasarkan konsep komunikasi Lasswell dalam Yusuf Abidin Zainal, terdapat 5 indikator komunikasi pemerintahan yaitu, siapa/sumber (*who*), berbicara apa (*says what*), saluran/komunikasi (*in which channel*), siapa/penerima (*to whom*), dan dampak/efeknya seperti apa (*what that effect*). Konsep komunikasi ini membantu mengidentifikasi setiap elemen penting dalam proses komunikasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa.

1. Siapa atau sumber (*who*) selaku komunikator

sumber atau komunikator adalah pihak atau pelaku yang menyampaikan informasi mengenai alokasi dana desa. Pihak ini dapat berupa seorang individu, kelompok, organisasi, atau Negara sebagai komunikator. Berikut ini dari indikator siapa atau sumber yang peneliti rangkum dari hasil wawancara informan yaitu, bahwa perangkat desa, termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan staf lainnya, memegang peran utama dalam menyampaikan informasi mengenai alokasi dana desa. Mereka bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan alokasi dana desa. Selain itu, kepala dusun juga memiliki peran penting dalam mengoordinasikan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat desa secara lebih langsung. Dengan demikian, koordinasi yang baik antara perangkat desa dan kepala dusun penting untuk memastikan informasi yang akurat dan tepat waktu sampai kepada seluruh masyarakat desa.

2. Pesan (*says what*)

Pesan menjelaskan apa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan kepada komunikan (penerima) dari komunikator atau isi informasi. Berikut ini dari indikator pesan yang peneliti rangkum dari hasil wawancara informan yaitu, pesan yang disampaikan hanya umumnya saja seperti tujuan dari alokasi dana desa, jumlah alokasi yang diterima oleh pemerintah desa, serta pembagian alokasi dana desa. Sehingga sebagian besar masyarakat desa masih kurang memahami secara detail bagaimana alokasi dana desa dilakukan, baik itu dari proses perencanaannya, serta pelaporannya. Dengan demikian, pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi, komunikasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan dana desa untuk memastikan manfaat yang optimal bagi pembangunan desa.

3. Saluran atau Media (*in which channel*)

Saluran atau media adalah alat atau media yang dimanfaatkan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan-pesan mereka. Berikut ini dari indikator saluran atau media yang peneliti rangkum dari hasil wawancara informan yaitu, saluran atau media yang digunakan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai alokasi dana desa memanfaatkan media online WhatsApp dan papan informasi APBDES yang terpajang didepan kantor desa.

4. Penerima (*to whom*) selaku Komunikan

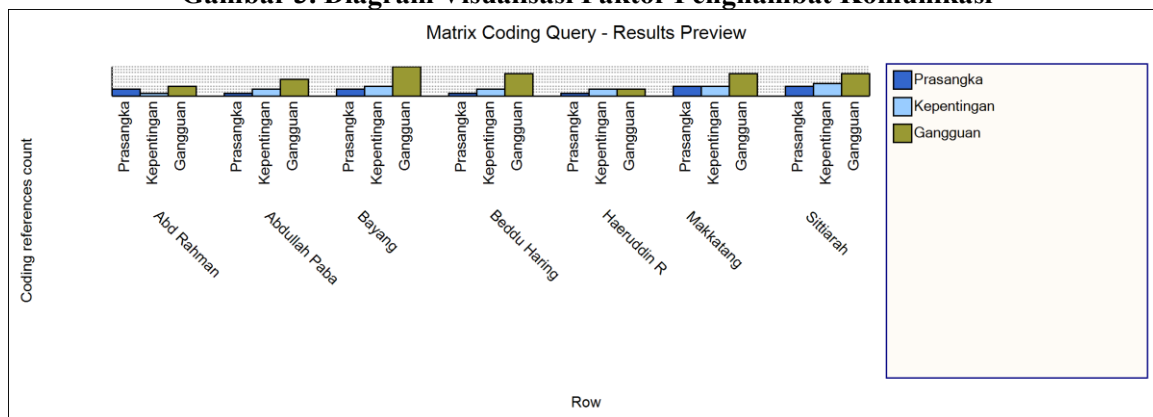
Komunikan (penerima) adalah orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Berikut ini dari indikator Penerima yang peneliti rangkum dari hasil wawancara informan yaitu, penerima informasi mengenai alokasi dana desa diterima oleh beberapa lapisan diantara ada aparat desa, badan permusyawaratan desa, kelompok masyarakat dan beberapa masyarakat desa. Namun Terdapat perbedaan dalam tingkat informasi yang diterima oleh berbagai pihak di desa. Perangkat desa dan BPD memiliki akses yang lebih mendetail terhadap informasi alokasi dana desa karena keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan dan pengawasan. Sementara itu, kelompok-kelompok masyarakat yang aktif juga menerima informasi yang lebih spesifik terkait dengan kegiatan dan proyek yang mereka jalankan. Namun, sebagian besar masyarakat desa hanya memiliki pemahaman umum mengenai alokasi dana desa tanpa detail yang lebih dalam.

5. Dampak atau Efek (*what that effect*)

Dampak atau efek adalah respon yang diberikan oleh komunikan atas pesan yang disampaikan oleh komunikator. Berikut ini dari indikator dampak atau efek yang peneliti rangkum dari hasil wawancara informan yaitu, ada dua dampak dari komunikasi pemerintah desa tentang alokasi dana desa, ada dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah pemahaman masyarakat yang meningkat mengenai alokasi dana desa. Sedangkan dampak negatif yang perlu diperhatikan. Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan yang disebabkan oleh akses jalan sehingga membuat masyarakat tidak puas. Hal ini mempengaruhi persepsi mereka terhadap kinerja pemerintah desa sebagai penanggung jawab pengelolaan alokasi dana desa dan penggunaan alokasi dana desa secara keseluruhan.

Faktor Penghambat Komunikasi Pemerintah

Gambar 3. Diagram Visualisasi Faktor Penghambat Komunikasi



Sumber: Hasil analisis Nvivo 12 Plus, 2024

Berdasarkan hasil analisis faktor penghambat komunikasi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tana Toro pada Abd Rahman sebagai Ketua BPD menyatakan bahwa gangguan menjadi faktor penghambat yang dominan dengan angka persentase sebesar 50,00%, kemudian prasangka berada pada angka persentase kedua yakni sebesar 33,33%, sedangkan kepentingan berada pada angka persentase paling rendah yakni sebesar 16,67%.

Berdasarkan hasil analisis faktor penghambat komunikasi pemerintah desa dalam Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tana Toro pada Abdullah Paba sebagai Kepala Desa menyatakan bahwa gangguan menjadi faktor penghambat yang dominan dengan angka persentase sebesar 62,50%, sedangkan kepentingan berada pada angka persentase kedua yakni sebesar 25,00%, dan sedangkan prasangka berada pada angka persentase paling rendah yakni sebesar 12,50%.

Berdasarkan hasil analisis faktor penghambat komunikasi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tana Toro pada Bayang sebagai masyarakat menyatakan bahwa gangguan menjadi hal yang dominan dari ketiga faktor penghambat dengan angka persentase sebesar 64,29%, selanjutnya kepentingan berada di angka persentase sebesar 21,43%, sedangkan prasangka berada di angka persentase paling rendah yakni sebesar 14,29%.

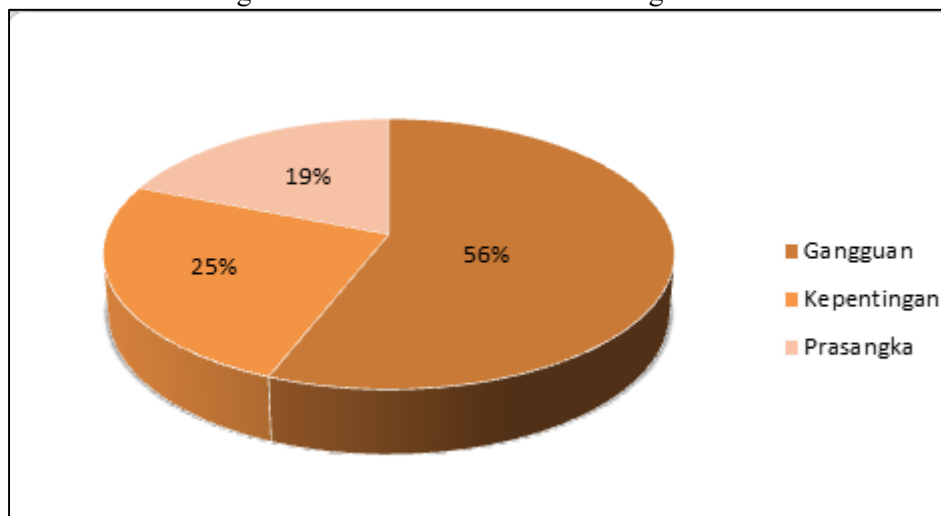
Berdasarkan hasil analisis faktor penghambat komunikasi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tana Toro pada Beddu Haring menyatakan bahwa gangguan menjadi hal yang dominan dari ketiga faktor penghambat dengan angka persentase sebesar 70,00%, selanjutnya kepentingan berada di angka persentase sebesar 20,00%, sedangkan prasangka berada di angka persentase paling rendah yakni sebesar 10,00%.

Berdasarkan hasil analisis faktor penghambat komunikasi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tana Toro pada Haeruddin R menyatakan bahwa gangguan dan kepentingan menjadi dua faktor penghambat yang dominan dengan angka persentase yang sama sebesar 40,00%, sedangkan prasangka berada pada angka persentase paling rendah yakni sebesar 20,00%.

Berdasarkan hasil analisis faktor penghambat komunikasi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tana Toro pada Makkatang sebagai Sekretaris Desa menyatakan bahwa gangguan menjadil hal yang dominan dari ketiga faktor penghambat dengan angka persentase sebesar 53,85%, sedangkan kepentingan dan prasangka menjadi dua faktor penghambat yang paling rendah dengan angka persentase sama sebesar 23,08%.

Berdasarkan hasil analisis faktor penghambat komunikasi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tana Toro pada Sittiarah menyatakan bahwa gangguan menjadi hal yang dominan dari ketiga faktor penghambat dengan angka persentase sebesar 50,00%, selanjutnya kepentingan dengan angka persentase sebesar 28,57%, sedangkan prasangka berada di angka persentase paling rendah yakni sebesar 21,43%.

Gambar 4. Diagram Validasi Indikator Faktor Penghambat Komunikasi



Sumber: Mixrosoft Exel, 2024

Dilihat dari hasil analisis faktor penghambat komunikasi pemerintah desa dapat disimpulkan bahwa gangguan menjadi faktor penghambat yang dominan dari tujuh informan dalam mewujudkan komunikasi yang efektif dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dilihat dari diagram di atas ketiga faktor penghambat gangguan menjadi faktor penghambat yang memiliki persentase paling tinggi mencapai 56%, sedangkan pada kepentingan mencapai 25%, kemudian untuk faktor penghambat yang memiliki persentase terendah ialah prasangka dengan angka persentase sebesar 19%.

Menurut Micelle Wifalin (2015) mengatakan ada 3 faktor penghambat komunikasi pemerintahan yakni gangguan, kepentingan dan prasangka.

1. Gangguan

Ada dua jenis gangguan yang menjadi penghambatan jalan nya komunikasi yang efektif yaitu gangguan sematic dan gangguan mekanik. Gangguan sematic adalah gangguan yang di sebabkan oleh bahasa terutama perbedaan dan pemahaman yang digunakan oleh komunikator atau komunikan sehingga menimbulkan ketidakselarasan dalam pesan yang di sampaikan, sedangkan gangguan mekanik adalah gangguan yang di sebabkan oleh sarana dalam komunikasi terutama yang menggunakan alat penggunaan media. Berikut inti dari indikator gangguan yang peneliti rangkum dari hasil wawancara informan yaitu, gangguan yang dihadapi dalam mengkomunikasikan pengelolaan alokasi dana desa adalah kurangnya aksesibilitas informasi yang disebabkan oleh cara penyampaian yang tidak memadai serta bahasa yang tidak sesuai dengan pemahaman masyarakat umum, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpercayaan dan kebingungan di kalangan masyarakat.

2. Kepentingan

Terkait kepentingan, apabila komunikator tidak memperhatikan kepentingan komunikan, hal ini dapat menimbulkan ketidak seimbangan antara komunikator dan komunikan. Berikut inti dari indikator kepentingan yang peneliti rangkum dari hasil wawancara informan yaitu, adanya

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



perbedaan kepentingan antara pemerintah desa dan masyarakat menghambat komunikasi berjalan efektif dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya transparansi dan aksesibilitas informasi terkait pengelolaan dana desa. Meskipun informasi yang disediakan di papan informasi membawa dampak positif berupa pemahaman yang lebih baik dan kesesuaian informasi dengan kegiatan yang dilakukan, namun juga dapat menghadirkan tantangan seperti keterlambatan dalam pelaksanaan proyek yang disebabkan oleh kendala fisik seperti sulitnya akses ke lokasi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memperbaiki infrastruktur dan sistem pengelolaan proyek agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat desa secara lebih efektif

3. Prasangka

Terkait prasangka, apabila komunikan memiliki prasangka terhadap komunikator, maka kecurigaan komunikan ke komunikator dapat menyebabkan hambatan dalam berkomunikasi. Selain itu adanya prasangka dan menentang kepada orang menyebabkan memperburuk keadaan, tetapi sebaliknya apabila komunikator mampu memberikan kesan baik kepada komunikan maka komunikasi bisa berjalan dengan efektif. Berikut inti dari indikator prasangka yang peneliti rangkum dari hasil wawancara informan yaitu, prasangka negatif terhadap pemerintah desa sering kali timbul karena kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku dan keinginan masyarakat, serta pentingnya mematuhi prosedur yang ada dalam penggunaan anggaran untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa. Dan keterlambatan dalam menyampaikan informasi terkait ADD oleh pemerintah desa dapat menghasilkan dampak negatif berupa pandangan buruk dari masyarakat dan menghambat komunikasi yang efektif antara kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan peneliti dari Penelitian Komunikasi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tana Toro Kabupaten Sidenreng Rappang, Maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses komunikasi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Tana Toro masih kurang efektif hal ini disebabkan saluran atau media yang digunakan masih kurang karena hanya menggunakan media papan informasi APBDes yang terpajang didepan kantor desa dan dari mulut kemulut sehingga penyampaian informasi tidak sampai kesemua lapisan masyarakat dan pesan yang tersampaikan pun hanya secara umum tidak dengan detail penggunaannya.
2. Ada pun Faktor Penghambat Komunikasi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa tidak berjalan efektif adalah adanya gangguan, kepentingan, dan Prasangka hal ini sejalan yang dikemukakan oleh *Micele Wifalin*. Dalam hal ini Gangguan menjadi faktor dominan dari kedua faktor lainnya.

REFERENSI

- Abidin, Y. Z. (2016). *Komunikasi Pemerintahan*. CV PUSTAKA SETIA.
- D. Alita, S. Priyanta, and N. R. (2019). Studi Analisis Pemikiran Ulama Mui Jawa Tengah Tentang Royalti, Zakat. *Journal of Chemical Information*, 53(9), 1689–1699.
- Dewi, E. N. (2021). Komunikasi Pemerintah Desa kepada Masyarakat Desa dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Perbatasan Provinsi Jawa Barat-Provinsi Banten. *Media Nusantara*, 175–182.
- Fathoni, I. (2021). *STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA ROWOTAMTU RAMBIPUJI JEMBER*.
- Hutami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP ...)*, 7(1).
- Razak, M. R. R. (2022). The Application Of Good Governance Principles For Performance Improvement Of Uluale Sub-District Office Apparatuses. *Journal of the Community Development in Asia*, 5(3), 13–22. <https://doi.org/10.32535/jcda.v5i3.1580>
- Razak, M. R. R., Jabbar, A., Sasmika, R., Syarifuddin, H., & Iqbal, M. (2022). *AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA*. 9(2), 459–469. <http://jurnal.um->

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 4 Juni 2024

tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Litbang Sukowati*, 2(1).

Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R & D*. ALFABETA, cv.